

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dan pasar bebas (*Free Trade*) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan bangsa yang adil dan makmur. Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini dalam hal mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu melalui pendidikan kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peranan SMK menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) tidak dapat diabaikan terutama dalam melaksanakan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Saat ini pemerintah Indonesia memiliki program dalam dunia pendidikan, yaitu meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak daripada jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMA. Perubahan jumlah sekolah ini dipicu oleh data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMA karena pada dasarnya SMA diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan *skill* (untuk SMA) bisa dikatakan tidak ada. Berbeda dengan pembelajaran di SMK, siswa SMK dituntut untuk memiliki *skill* serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat

menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK.

Program pemerintah tersebut terbilang cukup serius, terlihat dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2009 target rasio jumlah SMK dan SMA sebesar 60:40, tahun 2015 sebesar 50:50, tahun 2020 sebesar 40:60, dan tahun 2025 sebesar 30:70. Sementara itu, berdasarkan Statistik Pendidikan Menengah tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Pusat Statistik Pendidikan, rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 61:39. (PSP, 2006a dan PSP, 2006b). Perbandingan tersebut belum memperhitungkan jumlah pendidikan menengah di bawah Departemen Agama seperti MA dan MAK. Jika jumlahnya diperhitungkan maka rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan menjadi 70:30.

Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 dijelaskan bahwa: "Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu". Sebagai tindak lanjut dari implementasi undang-undang di atas, maka perlu dikembangkan suatu bentuk pendidikan kejuruan. Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Depdiknas bertujuan untuk:

- a) Menyiapkan siswa-siswi untuk memasuki lapangan pekerjaan serta mengembangkan sikap profesional
- b) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri

- c) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan atau untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.
- d) Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif.

Dalam tujuan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut di atas dikemukakan bahwa siswa SMK disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk dapat menjadi produktif yang terampil dalam mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi lulusan SMK mengacu pada standar kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Permintaan tenaga kerja kompeten dan professional seiring dengan pesatnya perkembangan industrialisasi hal ini mutlak diperlukan.

Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan nasional sesuai dengan paparan Kemdiknas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Namun yang diharapkan dari tujuan pendidikan itu khususnya tujuan SMK agar lulusan SMK menjadi tenaga siap pakai yang mudah terserap kerja, ternyata belum tercapai sama sekali. Para lulusan SMK justru menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi. Berdasarkan data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari lulusan SMK merupakan angka tertinggi secara nasional. Yang tidak

disangka pengangguran dari lulusan SMU justru lebih kecil dibandingkan jumlah pengangguran lulusan SMK.

Hal ini dapat dilihat dari data nasional yang hingga saat ini menunjukkan bahwa daya serap tingkat lulusan SMK masih cukup rendah, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2008 menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi TPT. Presentase tersebut dapat dilihat abwah pendidikan SMK mencapai angka 17,26 %, disusul tamatan SMA 14,31 %, Universitas 12,59 %, serta Diploma I/II/III 11,21 %, dan SMP 9,39 %. Pengangguran terkecil diperoleh dari tamatan SD ke bawah 4,57 %.

Pada bulan Agustus 2015, Data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 6,18 persen dari jumlah penduduk pada angkatan kerja atau meningkat 5,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Juga, berdasarkan klasifikasi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kontributor terbesar jumlah pengangguran terbuka yaitu hingga 12,65 persen, diikuti Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,32 persen. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Suhariyanto mengatakan bahwa angka pengangguran tertinggi Agustus 2015 memang di jenjang SMK dimana jumlah proyeksi angkatan kerja mencapai 17,26%, naik dari Februari 2015 sebesar 14,80 %, artinya satu diantara enam lulusan SMK masuk kategori menganggur (BPS, 2016).

Sementara itu dari data BPS Nasional tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2015 mencapai 6,71 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,48 poin dibanding TPT Agustus 2014, yaitu

sebesar 6,23 persen. Pada Agustus 2015, pekerja pada jenjang pendidikan menengah ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 1,83 juta orang (30,70%), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 169 ribu orang (2,84%) dan pekerja dengan pendidikan sarjana sebesar 465 ribu orang (7,79%).
<http://sumut.bps.go.id/frontend/Brs/view/id/77:16/08/2016,20;08>

Akan tetapi, pada era globalisasi dewasa ini, permasalahan pendidikan bukanlah hanya sekedar pada permasalahan meningkatkan tingkat pengangguran di tanah air, namun rusaknya perilaku moral pelajar pada masa ini yang dipengaruhi oleh pergaulan yang tidak mengenal arah yang mencerminkan buruknya pendidikan di Indonesia turut menjadi masalah yang essential. Kini Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan moral dan karakter yang sangat serius. Pergeseran orientasi kepribadian yang mengarah pada berbagai perilaku amoral sudah demikian jelas dan nampak terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak kenakalan anak dan remaja seperti tawuran, menyalahgunakan narkoba, dan kenakalan-kenakalan lain serta banyak kriminal dapat dengan mudah dijumpai melalui tayangan televisi maupun secara langsung. Persoalan yang tidak kalah seriusnya adalah Prakerin-Prakerin kebohongan dalam dunia pendidikan mulai pada saat ujian sampai pada plagiatisme. Jika sebagai peserta didik sudah terbiasa dengan tipu-menipu atau manipulasi ujian akan berdampak negatif pada pembentukan kepribadian peserta didik. Dalam hal ini, dunia pendidikan turut bertanggungjawab karena menghasilkan lulusan-lulusan yang dari segi akademis sangat bagus, namun tidak dari segi karakter.

Dalam realitas pembelajaran di sekolah, usaha untuk menyeimbangkan ketiga ranah (afektif, kognitif, psikomotorik) memang selalu diupayakan, namun pada kenyataannya yang dominan dimiliki anak adalah ranah kognitif kemudian psikomotorik. Akibatnya, peserta didik kaya akan kemampuan yang sifatnya *hard skill* namun miskin *soft skill* karena ranah afektif terabaikan. Gejala ini tampak pada *output* pendidikan yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, pintar, juara kelas, namun miskin kemampuan membangun relasi, bekerja sama dan cenderung egois, bahkan tertutup.

Hasil suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut: **pertama**, peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan – diantaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); **kedua**, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya ”mengetahui” sesuatu, melainkan ”dapat melakukan sesuatu” yang fungsional untuk kehidupannya (*learning and earning*); **ketiga**, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas.

Untuk mengatasi masalah di atas, manajemen di SMK dituntut tidak hanya sekedar mengadakan berbagai program dalam mendukung proses pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk lebih berkembang dari segi afektif dan

psikomotirik, akan tetapi juga memperhatikan faktor afektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan membekali peserta didik dan memberikan pengalaman kerja secara langsung pada dunia usaha dan dunia industri (Du/Di) yang sesuai dengan program keahlian peserta didik yang bersangkutan yaitu dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada sekolah menengah kejuruan.

Program Praktek Kerja Industri (Prakerin) pada dasarnya merupakan program pendidikan yang dibentuk dari pola Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang dalam operasionalnya dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah khususnya penguasaan teori dan ditempat-tempat usaha/industri terutama sebagai institusi pasangan untuk keperluan praktek kerja siswa. Di dua tempat tersebut di berikan penilaian baik oleh guru maupun instruktur yang mengajar praktek di institusi pasangannya. Sejalan dengan itu Nurharjadmo (2008:220) mengatakan bahwa program Prakerin adalah meliputi teori kejuruan, praktek dasar dan praktek kerja industri.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Prakerin lebih dimantapkan lagi dengan menggunakan acuan yang lebih mendasar yaitu yang tertulis dalam buku "Keterampilan Menjelang 2020 untuk Era Global" yang disusun oleh Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1997). Kemudian, penyelenggaraan Prakerin dibakukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Sistem Ganda pada

Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 31 Desember 1997, yang memuat komponen-komponen yang diperlukan dalam penyelenggaraan PSG. Inti dari “gerakan” ini adalah upaya untuk mendekatkan pendidikan kejuruan ke dunia usaha/industri.

Dalam pelaksanaan Prakerin, kendala dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu sekolah dan industri (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 1996). Disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh sekolah antara lain: (1) keragaman geografis, (2) keragaman kesiapan dan tingkat kemajuan SMK, dan (3) keragaman program SMK yang belum seimbang dengan keragaman industri di sekitarnya. Selanjutnya, kendala yang dirasakan oleh industri antara lain: (1) belum dimiliki struktur jabatan dan keahlian yang mantap, terutama pada industri kecil, dan menengah, (2) belum ada perencanaan alokasi biaya untuk pengembangan pendidikan, (3) belum dimilikinya persepsi tentang keuntungan Prakerin bagi industri, dan (4) kurangnya kesadaran tentang peningkatan keefektifan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan Prakerin, (5) belum adanya jaminan yang menyebutkan bahwa setelah masa pelaksanaan Prakerin seluruh siswa akan memiliki *hard skill* terutama *soft skill*.

Praktek Kerja Industri termasuk dalam pelatihan atau diklat sekolah (Oemar Hamalik, 2007:37). Pada mulanya diklat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat, harapan lainnya adalah sikap peserta diklat menjadi matang. Matang untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan organisasinya dan matang dalam menentukan pilihan pengembangan kemampuannya kedepannya.

Kegiatan Prakerin yang dilaksanakan oleh SMK tidak semua berjalan

dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Setelah peneliti melakukan observasi awal, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Prakerin yang diselenggarakan di SMK Swasta Arina Sidikalang pada bulan Agustus – Oktober 2016, yaitu:

- a) Sekolah kesulitan dalam mensinkronisasi antara jadwal penerjunan siswa dengan jam kerja di DU/DI,
- b) Sekolah kesulitan memilih tempat Prakerin yang tepat untuk siswa.
- c) Lokasi DU/DI terlalu jauh dari sekolah sehingga menghambat pelaksanaan monitoring dari guru pembimbing, evaluasi kebanyakan kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah,
- d) Tidak sebandingnya jumlah siswa yang akan Prakerin dengan jumlah tempat pelaksanaan Prakerin,
- e) Kurangnya disiplin siswa peserta Prakerin yang ditunjukkan dari daftar hadir yang terlihat dari laporan persentasi kehadiran siswa di tempat Prakerin.
- f) Kurangnya tanggungjawab siswa peserta Prakerin dalam mengerjakan tugas/Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang harus dikumpulkan pada akhir bulan.
- g) Kurangnya kepedulian siswa dalam menyelesaikan pembayaran biaya administrasi (uang sekolah, uang seragam, dll)

Selanjutnya, menurut Nunung Nurhaida (2012:10), mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat Prakerin tidak berjalan mulus. Di antara permasalahan yang muncul adalah: (1) Sulitnya menyalurkan siswa dalam satu waktu secara bersamaan, sehingga ada sebagian siswa yang mulai lebih awal dari siswa lain. Bahkan bisa terjadi sementara beberapa siswa sudah selesai Prakerin, siswa yang lain masih harus menunggu kesempatan tersebut; (2) Terkadang sulit untuk mendapat tempat Prakerin yang benar-benar sesuai dengan keahlian siswa di

sekolah, sehingga siswa ditempatkan di unit-unit yang memang membutuhkan tenaga mereka, apapun bentuk kerjaannya; (3) Kurangnya jalinan kemitraan yang dilakukan secara kontinyu. Artinya, pihak sekolah tidak menjalin kerjasama yang sangat erat kepada mitra perusahaan, sehingga terkadang sekolah harus mencarikan perusahaan-perusahaan baru bagi siswa-siswa mereka atau siswa mencari tempat baru baru mereka sendiri.

Permasalahan lain timbul yaitu manajemen Prakerin yang masih kurang efektif, hal ini dibuktikan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sukarnati (2012) bahwa:

- a) Kegiatan perencanaan meliputi pencarian tempat Prakerin siswa, penyiapan administrasi Prakerin dan format-format, pembimbingan, dan evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan belum mengadakan pertemuan yang berdampak pada penyiapan kompetensi siswa yang dibutuhkan oleh industri;
- b) Pelaksanaan Prakerin merupakan kegiatan yang belum ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah;
- c) Evaluasi hasil belajar Prakerin dilakukan oleh instruktur yang belum di ketahui kapasitas kependidikannya;
- d) Belum adanya pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prakerin, serta upaya-upaya pengembangan pelaksanaan Prakerin yang lebih baik.

Pengembangan program dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Industri harus terus dilakukan oleh para pengelola pendidikan kejuruan agar kualitas lulusannya sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Tantangan dunia kerja dengan kompetensi kerja yang makin tinggi seiring kemajuan teknologi dan dinamika tempat kerja menuntut institusi pendidikan kejuruan mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai kapabilitas yang ada. Sekolah pendidikan kejuruan sebagai penyedia calon tenaga kerja, harus

dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan jaringan sumber-sumber kemitraan dengan pihak luar secara efektif.

Budaya inovasi atau pengembangan sebagai proses yang melibatkan manajemen, tenaga profesional (kepala sekolah, guru) dan seluruh komunitas institusi termasuk *stakeholders* dapat melahirkan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Institusi dengan budaya yang inovatif menjadi dukungan bagi tim manajemen pengelola dalam memanfaatkan kapabilitas sumber daya internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas lulusan. Manajemen sekolah dalam mengembangkan pembelajaran perlu mempertimbangkan faktor budaya suatu daerah. Sebagai contoh di Kecamatan Sidikalang, merupakan sebuah kecamatan yang memiliki penduduk heterogen akan suku dan budaya, yang memiliki mayoritas budaya Batak, tentu di dalam pengembangan sebuah program pendidikan sebagai contoh program Prakerin, faktor sukuisme menjadi sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan.

Pendidikan dan kebudayaan memiliki tata hubungan yang saling mempengaruhi, dimana pendidikan merupakan unsur yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan karena pendidikan adalah sarana proses transformasi dan cermin nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang ditanamkan secara mengakar merupakan ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan mengenai adat istiadat yang diakui dan dijadikan identitas bangsa. Proses pengembangan nilai budaya menjadi landasan dari karakter yang mengkehendaki suatu proses berkelanjutan, dilakukan dalam berbagai mata pelajaran, program kegiatan

pendidikan di sekolah maupun di dunia industri dan lingkungan siswa berinteraksi. Dalam mengembangkan pendidikan karakter, kesadaran akan siapa diri dan budayanya adalah bagian yang sangat penting (Tilaar, 1969:8). Dengan demikian nilai budaya dari sebuah kelompok sangat diperlukan untuk menentukan sebuah kebijakan ataupun keputusan bagi kelompok tersebut dalam pencapaian tujuan.

Pengembangan model manajemen Praktek Kerja Industri siswa berbasis karakter dan budaya lokal di SMK sangat perlu dilakukan, mengingat perkembangan dunia teknologi yang semakin cepat dan kebutuhan sumber daya manusia di dunia usaha/industri kian kompetitif, sekolah dituntut menciptakan inovasi guna memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Sekolah harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang keterampilan saja akan tetapi unggul dalam bidang sikap juga.

Sebenarnya model pengembangan sejenis seperti ini sudah ada di Indonesia, sebagai contoh model *Work-Based Learning (WBL)* dalam disertasi Budi Try Suwanto (2012). WBL adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan pengalaman-pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada pengembangan sosial, akademik, dan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan karakter positif yang dimiliki siswa.

Adopsi Prakerin berbasis karakter di Indonesia tidaklah asing dan telah berlangsung lama. Keterlibatan dunia kerja khususnya dunia usaha/industri terus dikembangkan dalam penerapan kebijakan pengembangan sistem pendidikan kejuruan. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) dalam berbagai model sebagai implementasi dari kebijakan *link & match* yang merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan Prakerin. Sekalipun dalam segi kualitas pelaksanaan program Prakerin masih memerlukan banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetapi kemajuan kuantitas itu adalah gambaran keberterimaan (*acceptability*) program Prakerin, terutama oleh pihak dunia usaha dan industri yang ikut menjadi pemeran kunci pelaksanaan program Prakerin.

Pentingnya karakter siswa dibangun dalam proses pelaksanaan Prakerin merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter siswa SMK pada saat melaksanakan Prakerin, dimana penanaman nilai karakter tersebut seperti; (1) religius, (2) disiplin, (3) kerja sama, (4) bersahabat, (5) tanggung jawab, (6) jujur, dan (7) sopan; sebagai media pengarah dan pembimbing siswa mempunyai tujuan untuk mendorong perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Juntika (2005:82) juga memberikan pendapat bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu komponen yang sangat penting didalam pelaksanaan Prakerin sebagai salah satu yang dapat mendorong pembentukan karakter yang baik pada siswa. Selain itu Wardiman Djojonegoro (1998: 99-111) menyatakan hasil-hasil penting yang dicapai sebagai buah implementasi kebijakan *link and match* dapat dikemukakan, antara lain: (1) pembaruan wawasan yang lebih

baik dan memiliki karakter, seperti: a) (2) pembentukan lembaga pendukung Prakerin; (3) penyusunan perangkat pendukung (*software*) PSG; (4) peningkatan peran serta industri dan peningkatan kesempatan kerja industri bagi siswa SMK; (5) peningkatan mutu dan pengakuan terhadap tamatan SMK; (6) peningkatan minat memasuki SMK; (7) penyempurnaan kurikulum; (8) penataan dan pengembangan manajemen SMK; (9) pelaksanaan unit produksi pada SMK; (10) pemasyarakatan program Prakerin; (11) gebyar SMK; (12) pelaksanaan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS); (13) penerbitan buku putih "*Skill Towards 2020*" (Keterampilan Menjelang 2020); (14) diterbitkannya berbagai keputusan menteri tentang pelaksanaan PSG/Prakerin; (15) diberlakukannya sistem evaluasi SMK; (16) penyempurnaan organisasi Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; (17) Pembangunan SMK baru; dan (18) peningkatan mutu SMK swasta.

Upaya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Prakerin berbasis karakter sehingga tercipta *link* dan *match* antara kebutuhan sekolah, tujuan pendidikan nasional, sejalan dengan kebutuhan dunia usaha/industri, harus ada sebuah sistim yang baru yang menjadi jembatan terciptanya tujuan tersebut untuk mengganti sistim konvensional yang selama ini berlaku di SMK. Pengembangan model Prakerin berbasis karakter Batak menjadi sebuah alternatif yang cocok dengan kondisi tersebut, karena model ini sangat efektif dan sebagai:

- a) perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern.

- b) sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kian maju.
- c) panduan dan kerangka kerja (*frame work*) untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam menyeimbangkan aspek *soft skill* dan dengan *hard skill* lulusan.
- d) rumusan konsepsi pengembangan nilai karakter siswa melalui pendekatan budaya lokal yang dimiliki siswa tersebut untuk menjadi lebih baik dan berkarater positif.
- e) Sarana dalam menentukan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan lembaga pendidikan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada.

Berangkat dari latar belakang dan fenomena yang telah digambarkan di atas, maka menarik untuk dikaji dan diadakan penelitian dan pengembangan guna mendapatkan informasi yang mendalam dan menemukan solusi manajemen Prakerin bagi siswa yang lebih baik dan dikelola secara sistematis di SMK yang ada di Kecamatan Sidikalang, tentunya mengembangkan nilai karakter yang dimiliki siswa itu sendiri. Maka dengan ini peneliti mengambil judul penelitian

Pengembangan Model Manajemen Program Praktek Kerja Industri Siswa berbasis Karakter Batak di SMK Kecamatan Sidikalang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Terjadinya demoralisasi perilaku anak-anak setelah melaksanakan Prakerin yang ditunjukkan dengan sikap malas, tidak bertanggungjawab dan kurang disiplin.
- b) Kurikulum di SMK selama ini mengutamakan *hard skill* daripada *soft skill* yang ditunjukkan dengan meningkatnya kenakalan remaja di kalangan siswa SMK.
- c) Sekolah kesulitan dalam mensinkronisasi antara jadwal penerjunan siswa dengan jam kerja di DU/DI,
- d) Sekolah kesulitan memilih tempat Prakerin yang tepat untuk siswa.
- e) Lokasi DU/DI terlalu jauh dari sekolah sehingga menghambat pelaksanaan monitoring dari guru pembimbing, evaluasi kebanyakan kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah,
- f) Tidak sebandingnya jumlah siswa yang Prakerin dengan jumlah tempat pelaksanaan Prakerin.
- g) Landasan Hukum pelaksanaan Prakerin yang ada tidak disertai dengan adanya MoU antara pihak sekolah dan Du/Di.
- h) Tamatan SMK menjadi penyumbang angka terbesar dalam pengangguran di Indonesia.
- i) Evaluasi kebanyakan kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan sekolah.
- j) Sekolah kesulitan dalam menyalurkan siswa dalam satu waktu secara bersamaan dan kurangnya jalinan kemitraan yang dilakukan secara kontiniu.

- k) Dalam kegiatan perencanaan belum mengadakan pertemuan yang berdampak pada penyiapan kompetensi siswa yang dibutuhkan oleh industri.
- l) Belum adanya pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prakerin, serta upaya-upaya peningkatan/ pengembangan pelaksanaan Prakerin yang lebih baik.
- m) Keberadaan institusi pasangan hanya sebatas menjadi tempat praktek siswa untuk melaksanakan Prakerin, dan tidak ada keberlangsungan kerjasama dari pihak sekolah.
- n) Kurangnya intensitas pertemuan antara guru pembimbing dengan instruktur dari industri, adanya pihak yang menganggap Prakerin sebagai rutinitas saja.

1.3. Batasan Masalah

Melihat permasalahan di atas yang begitu luas dan kompleks, diperlukan pembatasan masalah dengan meninjau proses manajemen Prakerin siswa dalam penyelenggaraan praktek, meliputi manajemen; perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Nilai-nilai karakter Batak apa saja yang relevan dengan manajemen Prakerin siswa di SMK Kecamatan Sidikalang?
- b) Bagaimanakah luaran (*output*) model Prakerin Siswa Berbasis Karakter Batak di SMK Kecamatan Sidikalang?
- c) Bagaimana tanggapan manajemen sekolah terhadap penerapan model Prakerin siswa berbasis karakter Batak?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan pedoman model manajemen program Prakerin berbasis karakter Batak dengan rumusan tujuan khusus sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi nilai-nilai karakter Batak yang relevan dengan manajemen Prakerin siswa di SMK Kecamatan Sidikalang.
- b) Mengetahui luaran (*output*) model manajemen Prakerin Siswa Berbasis Karakter Batak di SMK Kecamatan Sidikalang.
- c) Mengetahui tanggapan manajemen sekolah terhadap penerapan model Prakerin siswa berbasis karakter Batak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan pengayaan konsep manajemen pendidikan berbasis budaya lokal melalui program Prakerin di tingkat SMK. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi

untuk memperbaiki praktek/implementasi manajemen program Prakerin di SMK se Kabupaten Dairi.

1.6.2. Praktis

a. Bagi Pihak Sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala, dan Guru)

Sebagai acuan dalam menyelenggarakan manajemen praktek kerja industri berbasis karakter batak berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan di sekolah guna memperbaiki kualitas program yang dilaksanakan di sekolah.

b. Bagi pihak DU/DI (bagian yang terkait)

Memberikan kontribusi pada pihak DU/DI dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pencapaian sasaran program kemitraan dalam Prakerin dan pembelajaran siswa praktekum.

c. Bagi Dinas Pendidikan (Bidang Pendidikan Menengah)

Sebagai sarana penentuan kebijakan bersama pelaksanaan Prakerin berkarakter di SMK yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.